



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Jumat

Tanggal: 11 September 2020

Halaman: 1

Jakarta Kembali Berlakukannya PSBB Total

DIY Waspadai Gelombang Pemudik

YOGYA (KR) - Pemerintah Daerah (Pemda) DIY segera berkoordinasi terkait kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan diberlakukan kembali secara total di Jakarta mulai tanggal 14 September nanti. Hal yang dikhawatirkan terkait munculnya gelombang pemudik besar-besaran sebelum PSBB resmi diberlakukan kembali.

"Sekarang ini yang perlu kita waspadai justru PSBB Jakarta. Kita khawatir sebelum tanggal tersebut, mungkin orang Yogya yang ada di Jakarta kembali seperti kemarin. Itu yang semestinya harus kita waspadai," ujar Gubernur DIY Sri Sultan HB X usai menghadiri rapat paripurna di DPRD DIY, Kamis (10/9).

Untuk itu Sultan meminta kepada Wakil Gubernur (Wagub) sebagai Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Pemda DIY untuk melakukan rapat satgas dalam rangka mengantisipasi hal tersebut. "Saya berharap bagaimana lurah-lurah bisa mewaspadai seperti dulu. Tidak masalah jika ada penjaan lagi di desa-desa, karena itu

* Bersambung hal 7 kol 1

DIY Sambungan hal 1

untuk memudahkan penelusuran jika ada kasus positif," ujarnya.

Saat Jakarta memberlakukan PSBB beberapa waktu lalu, imbasnya sampai ke daerah. Karena warga tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Dari pada menganggur dan banyak pengeluaran, memilih untuk pulang ke daerah asal dan menimbulkan masalah baru.

"Karena di daerah menjadi banyak pemudik yang kesehatannya harus dipertanyakan. Akan segera kita koordinasikan dengan Kabupaten/kota. Termasuk penegakan protokol kesehatan sesuai dengan Pergub Nomor 77/2020 akan kita perketat," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Baskara Aji.

Ketika disinggung apakah Pemda DIY akan kembali mengaktifkan posko di perbatasan, menurut Aji saat ini sudah sangat sulit.

Mengingat jumlah kendaraan yang keluar masuk sudah banyak. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan saat ini adalah di titik kedatangan mereka. Seperti terminal, stasiun dan bandara.

Salama dan tidak ada surat dari Kemenkes jika test kesehatan, seperti rapid tes maupun swab tidak diperlukan lagi untuk perjalanan. Pemda DIY masih tetap memberlakukan kebijakan tersebut. "Kalau tidak melanggar tetap akan kita bertakutkan," ungkapnya.

DPRD DIY mendesak kepada Pemda DIY akan mengaktifkan kembali pos-pos pemantauan di wilayah perbatasan. Seperti dengan Kabupaten Purworejo, Klaten, Magelang dan Sukoharjo serta Wonogiri.

(Awh/Bro)d

1.
2.

☐ Positif ☐ Amat Segera ☐ Untuk Ditanggapi

☐ Positif ☐ Segera ☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005